



Ranah Research
Journal of Multidisciplinary Research and Development

082170743613 ranahresearch@gmail.com <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: 2655-0865



DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v8i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Sistem Informasi Berbasis Website dengan Pendekatan Struktural untuk Pendataan dan Distribusi Bantuan Sosial yang Transparan dan Akuntabel di Tingkat RT

Jenny Clarisa Azhari¹, Muhammad Athallah Izma², Muhammad Rayyan Ardiano³, Steven Christian⁴, Syaeful Bachri Barelang⁵, Bambang Irawan⁶

¹Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Esa Unggul, jennyclarisaazhari@student.esaunggul.ac.id

²Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Esa Unggul, athgaming1306@student.esaunggul.ac.id

³Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Esa Unggul, official.song977@student.esaunggul.ac.id

⁴Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Esa Unggul, Stevenchristian2005@student.esaunggul.ac.id

⁵Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Esa Unggul, bachri_barelang@student.esaunggul.ac.id

⁶Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Esa Unggul, bambang.irawan@esaunggul.ac.id

Corresponding Author: bambang.irawan@esaunggul.ac.id⁶

Abstract: *This research explores the implementation of a web-based information system to support effectiveness and transparency in the process of data collection and distribution of social assistance (bansos). The system is designed with a structural approach that involves the role of RT (Rukun Tetangga) as a conveying information related to assistance to residents. The validation of the eligibility of social assistance recipients is carried out automatically through specific parameters, including: the physical condition of the building based on timestamp data, electricity consumption (kWh), the latest level of education, and the completeness of population administration documents (KTP and KK). The main innovation of this research is the automatic validation mechanism that can minimize subjective bias while considering the limited digital access of prospective recipients. In addition, the system is equipped with analytic capabilities to generate periodic reports that can identify beneficiaries on a recurring basis, thus enabling more effective and accountable resource allocation.*

Keywords: *Social Assistance, Auto-Validation, Allocation, Transparency.*

Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi implementasi sistem informasi berbasis *website* untuk mendukung efektivitas dan transparansi dalam proses pendataan serta distribusi bantuan sosial (bansos). Sistem dirancang dengan pendekatan struktural yang melibatkan peran RT (Rukun Tetangga) sebagai penyampai informasi terkait bantuan kepada warga. Validasi kelayakan penerima bantuan sosial dilakukan secara otomatis melalui parameter spesifik, meliputi:

kondisi fisik bangunan berdasarkan data *timestamp*, konsumsi listrik (kWh), tingkat pendidikan terakhir, serta kelengkapan dokumen administrasi kependudukan (KTP dan KK). Inovasi utama penelitian ini adalah mekanisme validasi otomatis yang dapat meminimalkan bias subjektif sekaligus mempertimbangkan keterbatasan akses digital calon penerima. Selain itu, sistem ini dilengkapi dengan kemampuan analitik untuk menghasilkan laporan berkala yang dapat mengidentifikasi penerima bantuan secara berulang, sehingga memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efektif dan akuntabel.

Kata Kunci: Bantuan Sosial, Validasi Otomatis, Alokasi, Transparansi.

PENDAHULUAN

Aspek pendataan dan penyaluran bantuan sosial (bansos) memegang peranan krusial dalam strategi pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan serta mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat. Keakuratan data dan ketepatan distribusi menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa bantuan diterima oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan (Isbandi Rukminto, 2021). Namun, sering kali implementasi bansos dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti proses validasi penerima yang kurang objektif, distribusi yang tidak merata, serta terbatasnya transparansi dalam pengelolaan data penerima bantuan (Irwan & Delfiyan, 2020). Permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakefektifan dalam penyelenggaraan program bansos (Samsul, 2019).

Di tingkat mikro, khususnya lingkungan Rukun Tangga (RT), informasi mengenai ketersediaan dan distribusi bansos umumnya dilakukan secara manual (Santoso & Aisyah, 2020). Kondisi ini menyebabkan tidak optimalnya penyampaian informasi kepada masyarakat yang berhak, serta memicu adanya kesalahan atau penyimpangan dalam distribusi bantuan (Nurmandi & Fahlevi, 2020). Dengan demikian, penting dikembangkan suatu sistem informasi yang bersifat struktural dan terintegrasi secara digital untuk meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam pengelolaan bansos (Robbins & Coulter, 2018).

Penelitian ini bertujuan merancang suatu sistem informasi berbasis *web* yang mampu melakukan proses validasi secara objektif. Sistem ini dirancang dengan mengacu pada parameter-parameter yang telah didefinisikan secara jelas dan terukur, sehingga dapat meningkatkan akurasi dan transparansi dalam pengambilan keputusan terkait bantuan sosial (Santoso & Aisyah, 2020; Zulkarnaen & Sari, 2021). Parameter tersebut mencakup kondisi fisik rumah berdasarkan *timestamp* pengumpulan data, konsumsi listrik rumah tangga dalam satuan kWh, tingkat pendidikan terakhir calon penerima, serta kelengkapan administrasi kependudukan yang terdiri dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (Irwan & Delfiyan, 2020). Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat meminimalisir bias subjektif dalam penentuan penerima bansos dan meningkatkan akurasi pendataan (Ridwan & Nasution, 2019).

Sistem ini didesain dengan mempertimbangkan kendala akses teknologi informasi yang sering dialami oleh calon penerima bantuan (Ridwan & Nasution, 2019). Oleh sebab itu, mekanisme penyampaian informasi oleh RT tetap dipertahankan sebagai jalur komunikasi utama, sementara validasi dan pelaporan data dilakukan melalui sistem website (Samsul, 2019). Hal ini memungkinkan RT berperan sebagai perantara efektif yang menjamin keterjangkauan informasi oleh seluruh warga, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan akses digital (Yin, 2018).

Keunikan sistem ini juga terletak pada fitur analitik yang secara otomatis menghasilkan laporan terstruktur mengenai distribusi bantuan (Santoso & Aisyah, 2020). Laporan tersebut mampu mengidentifikasi penerima yang paling sering mendapatkan bantuan sosial secara berkala, memungkinkan pengambil kebijakan untuk mengambil tindakan strategis dalam menentukan sasaran bantuan selanjutnya (Irwan & Delfiyan, 2020). Dengan demikian, tujuan

utama dari program bansos, yaitu keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan, dapat tercapai secara optimal (Isbandi Rukminto, 2021; Ward Creswell & Poth, 2018).

Dalam implementasi sistem ini, diharapkan adanya sinergi yang kuat antara teknologi digital dengan struktur administrasi sosial tingkat RT (Robbins & Coulter, 2018). Kombinasi ini menjadi langkah signifikan dalam mengatasi tantangan klasik pendataan dan distribusi bansos serta memastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan pemerintah benar-benar mencapai sasaran yang tepat (Zulkarnaen & Sari, 2021).

METODE

Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan sistem informasi berbasis *web* dalam kegiatan pendataan dan penyaluran bantuan sosial di lingkungan Rukun Tetangga (RT). Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap dinamika serta konteks sosial yang melatarbelakangi praktik di lapangan (Miles et al., 2018; Yin, 2018). Pendekatan ini dipilih karena relevansi dan kemampuannya dalam menjelaskan kompleksitas fenomena sosial secara mendetail, yang tidak dapat diperoleh hanya dengan pendekatan kuantitatif (Miles et al., 2018; Sugiyono, 2020).

Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive*, yaitu memilih lingkungan RT tertentu yang secara aktif menerapkan sistem informasi *website* dalam manajemen bansos (Denzin K. & Lincoln S., 2017). Informan penelitian terdiri dari pengurus RT, petugas pendataan, serta penerima bantuan sosial yang dipilih dengan teknik *snowball sampling*, guna mendapatkan informasi yang komprehensif dan beragam (Denzin K. & Lincoln S., 2017).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui berbagai teknik, antara lain wawancara mendalam dengan para informan kunci, observasi partisipatif untuk memahami kondisi secara langsung, serta telaah dokumen yang berkaitan dengan proses distribusi bantuan sosial (Miles et al., 2018; Moleong, 2019). Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi rinci mengenai persepsi, pengalaman, dan kendala yang dihadapi informan dalam mengimplementasikan sistem tersebut. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengikuti secara langsung proses pendataan dan distribusi bansos menggunakan sistem *website*, guna menangkap nuansa konteks sosial yang lebih otentik (Denzin K. & Lincoln S., 2017; Moleong, 2019). Analisis dokumen meliputi kajian terhadap data administrasi penerima bantuan, catatan *timestamp* kondisi bangunan, konsumsi listrik (kWh), pendidikan terakhir, serta dokumen administrasi seperti KTP dan KK (Irwan & Delfiyan, 2020; Santoso & Aisyah, 2020).

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik. Teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola, tema, dan makna yang tersembunyi di balik data hasil wawancara, observasi, maupun dokumen yang telah dikumpulkan, sehingga mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai fenomena yang diteliti (Miles et al., 2018). Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk yang sistematis agar mudah dipahami, serta penarikan kesimpulan yang disertai proses verifikasi guna menjamin keabsahan dan keandalan hasil penelitian. (Patton, 2015; Sugiyono, 2020).

Penelitian ini secara khusus memperhatikan aspek etika penelitian dengan menjaga kerahasiaan identitas informan, serta meminta persetujuan tertulis (*informed consent*) sebelum melakukan wawancara maupun observasi (Ward Creswell & Poth, 2018). Keterlibatan informan dalam proses validasi hasil temuan (*member checking*) juga dilakukan untuk memperkuat validitas penelitian (Ridwan & Nasution, 2019).

Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap secara mendalam bagaimana penggunaan teknologi digital dapat mempengaruhi transparansi dan efisiensi pendataan serta distribusi bansos (Nurmandi & Fahlevi, 2020; Robbins & Coulter, 2018), serta bagaimana keterlibatan struktur sosial RT dapat memperkuat atau menghambat efektivitas implementasi sistem tersebut (Samsul, 2019; Zulkarnaen & Sari, 2021). Dengan demikian,

penelitian ini mampu memberikan wawasan baru yang signifikan terkait optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam konteks sosial, yang hingga kini masih jarang dikaji secara mendalam di jurnal-jurnal ilmiah nasional maupun internasional (Isbandi Rukminto, 2021; Yin, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, terungkap sejumlah temuan penting yang memberikan gambaran mendalam mengenai bagaimana sistem informasi berbasis website diimplementasikan secara nyata dalam proses pendataan dan distribusi bantuan sosial pada tingkat lingkungan Rukun Tetangga (RT). Penelitian ini tidak hanya mengandalkan satu sumber data, tetapi memadukan berbagai teknik pengumpulan informasi secara triangulatif, seperti wawancara mendalam dengan narasumber kunci yang memiliki peran langsung dalam proses implementasi, observasi lapangan yang melibatkan keterlibatan aktif peneliti dalam memantau kegiatan, serta telaah terhadap dokumen administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan program bansos.

Dari analisis mendalam terhadap data yang diperoleh, disusun pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika pelaksanaan sistem ini di tingkat mikro. Temuan-temuan yang berhasil dikonstruksi melalui proses analisis tersebut menunjukkan bahwa penggunaan sistem digital dalam pendataan dan distribusi bansos telah memberikan sejumlah manfaat yang konkret. Salah satu manfaat utama adalah percepatan proses administratif yang sebelumnya cenderung lambat dan rentan terhadap kesalahan input manual. Sistem berbasis website memungkinkan integrasi data secara real-time serta memperkecil potensi redundansi dan inkonsistensi data.

Lebih dari sekadar efisiensi teknis, penerapan sistem ini juga membawa dampak signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial. Artinya, proses penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran karena data penerima dapat diverifikasi secara sistematis. Selain itu, sistem ini juga memperkuat prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi publik. Masyarakat dapat memantau proses distribusi secara lebih terbuka, bahkan dalam beberapa kasus, penerima manfaat dapat mengakses sendiri informasi terkait status bantuan mereka melalui antarmuka sistem yang tersedia.

Kemampuan sistem untuk menyimpan jejak digital dari setiap aktivitas distribusi memungkinkan proses pelacakan (tracking) yang lebih mudah dan objektif. Dengan demikian, setiap keputusan dan tindakan dalam proses penyaluran bantuan dapat dipertanggungjawabkan dengan data yang sah. Hal ini mendorong terciptanya ekosistem pelayanan sosial yang lebih adil, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat luas. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa transformasi digital dalam pengelolaan bantuan sosial bukan hanya mungkin dilakukan di tingkat akar rumput seperti RT, tetapi juga membawa perubahan nyata yang memperkuat tata kelola sosial berbasis teknologi.

Pertama, temuan penelitian menunjukkan bahwa proses pendataan melalui sistem *website* mampu meningkatkan objektivitas validasi penerima bansos secara signifikan. Penggunaan parameter jelas seperti kondisi fisik rumah yang terekam melalui *timestamp*, konsumsi listrik rumah tangga dalam satuan kWh, tingkat pendidikan terakhir, serta kelengkapan administrasi kependudukan (KTP dan KK), secara efektif mampu mengurangi bias subjektif yang sebelumnya sering muncul dalam metode pendataan manual. Informan yang terdiri dari pengurus RT dan petugas pendataan menyatakan bahwa parameter tersebut membantu mereka dalam menentukan prioritas bantuan secara lebih akurat (Irwan & Delfiyan, 2020; Samsul, 2019; Santoso & Aisyah, 2020).

Kedua, selain meningkatkan efisiensi, penerapan sistem informasi ini juga terbukti mampu mendorong terwujudnya transparansi dalam pelaksanaan distribusi bantuan sosial. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, dapat dilihat bahwa keterbukaan informasi yang disediakan oleh platform digital tersebut memberikan akses luas kepada masyarakat untuk

mengetahui berbagai aspek yang berkaitan dengan program bantuan, seperti persyaratan penerima, alur distribusi, serta waktu penyaluran. Hal ini menciptakan ruang partisipasi publik yang lebih luas, di mana warga tidak hanya menjadi penerima pasif, tetapi juga turut mengawasi proses distribusi. Transparansi ini secara nyata menurunkan potensi munculnya kesalahpahaman, prasangka negatif, atau konflik sosial yang biasanya disebabkan oleh kurangnya informasi atau dugaan praktik pilih kasih dalam distribusi bantuan. Dengan demikian, sistem ini menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara program bantuan sosial di tingkat lokal (Nurmandi & Fahlevi, 2020; Robbins & Coulter, 2018). Penggunaan *website* juga memungkinkan pelaporan dan *monitoring* distribusi bantuan secara *real-time*, yang sebelumnya sulit diwujudkan melalui proses manual.

Ketiga, penelitian ini juga menemukan bahwa peran RT sebagai perantara informasi sangat penting dalam mengatasi keterbatasan akses digital yang dialami oleh sebagian warga. Walaupun sistem ini berbasis digital, temuan wawancara mendalam dengan penerima bantuan menunjukkan bahwa banyak warga masih bergantung pada informasi langsung dari pengurus RT. Strategi ini terbukti efektif dalam menjembatani kesenjangan digital di masyarakat, khususnya bagi warga lanjut usia atau mereka yang kurang melek teknologi (Ridwan & Nasution, 2019; Zulkarnaen & Sari, 2021). Oleh sebab itu, kombinasi antara teknologi digital dengan pendekatan komunikasi *interpersonal* yang dilakukan RT adalah kunci keberhasilan implementasi sistem ini.

Selanjutnya, sistem informasi ini juga dilengkapi dengan fitur analitik yang mampu menyusun laporan distribusi bantuan secara berkala dan otomatis. Keberadaan fitur ini terbukti memberikan nilai tambah yang signifikan, khususnya dalam mendukung proses pengambilan keputusan strategis oleh pengurus RT maupun pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen-dokumen sistem yang terekam, ditemukan bahwa informasi yang dihimpun dapat menunjukkan pola-pola distribusi bantuan, termasuk identifikasi penerima bantuan yang berulang atau kelompok masyarakat yang lebih rentan terhadap krisis ekonomi. Data ini menjadi bahan refleksi yang sangat berharga dalam mengevaluasi apakah proses distribusi telah berlangsung secara merata dan adil. Lebih jauh, informasi analitik tersebut memungkinkan penyusunan kebijakan yang lebih terukur di masa depan, sehingga alokasi bantuan tidak hanya didasarkan pada asumsi atau kedekatan sosial, melainkan pada data objektif yang akurat dan relevan. (Irwan & Delfiyan, 2020; Santoso & Aisyah, 2020).

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam implementasi sistem tersebut. Salah satunya adalah tantangan teknis berupa kestabilan jaringan internet yang sering kali tidak optimal, terutama di lingkungan yang masih tergolong terpencil atau kurang maju secara infrastruktur teknologi (Sugiyono, 2020). Selain itu, hasil wawancara mengungkap bahwa terdapat beberapa hambatan sosial berupa kurangnya pemahaman awal tentang manfaat sistem digital di kalangan warga tertentu, yang memerlukan sosialisasi intensif dan pendampingan berkelanjutan (Patton, 2015).

Sebagai langkah solusi, penting dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya pelatihan bagi pengurus RT dan warga dalam menggunakan sistem informasi digital ini. Selain itu, perlu adanya dukungan pemerintah lokal dalam bentuk peningkatan infrastruktur teknologi informasi agar akses internet lebih merata dan stabil di semua wilayah, terutama di lokasi yang jauh dari pusat perkotaan (Isbandi Rukminto, 2021; Moleong, 2019).

Secara keseluruhan, penelitian ini secara jelas mengidentifikasi bahwa implementasi sistem informasi berbasis *website* memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan efektivitas, transparansi, dan keadilan dalam pendataan serta distribusi bantuan sosial. Meskipun terdapat tantangan yang perlu diatasi, hasil penelitian ini menawarkan wawasan berharga bahwa integrasi teknologi digital dalam manajemen bantuan sosial di tingkat mikro, khususnya lingkungan RT, mampu menjawab berbagai permasalahan klasik yang selama ini sering dihadapi (Denzin K. & Lincoln S., 2017; Yin, 2018).

Dalam konteks akademik, penelitian ini membuka ruang baru untuk kajian lebih lanjut mengenai integrasi teknologi informasi dalam administrasi sosial, khususnya dalam konteks negara berkembang yang memiliki tantangan spesifik terkait infrastruktur teknologi dan kapasitas sumber daya manusia. Hasil ini juga menjadi acuan penting bagi pengambil kebijakan dalam merancang dan menerapkan sistem serupa yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan rangkaian proses penelitian yang telah dilakukan secara sistematis, serta analisis mendalam yang menyeluruh terhadap data yang diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan informasi, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi berbasis website dalam mendukung kegiatan pendataan dan penyaluran bantuan sosial (bansos) memberikan dampak yang sangat signifikan dan positif. Dampak tersebut terutama terlihat dalam peningkatan kualitas tata kelola distribusi bantuan di tingkat Rukun Tetangga (RT), yang merupakan garda terdepan dalam struktur sosial masyarakat.

Implementasi sistem ini tidak hanya mempercepat proses administrasi secara teknis, namun juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan layanan publik yang baik, yaitu efektivitas, transparansi, dan keadilan. Dengan adanya digitalisasi proses, berbagai informasi penting—seperti data penerima bantuan, kriteria kelayakan, hingga status distribusi—dapat diakses secara lebih terbuka dan akuntabel. Hal ini secara langsung mendukung upaya menciptakan sistem pendistribusian bantuan yang lebih bertanggung jawab, sekaligus meminimalisir kemungkinan penyimpangan dalam praktik di lapangan.

Selain aspek teknis, faktor manusia juga turut memainkan peran sentral. Keterlibatan langsung perangkat RT sebagai penghubung antara sistem dan masyarakat luas menjadi elemen krusial yang tidak bisa diabaikan. RT, sebagai figur yang paling dekat dengan warga, berperan dalam menyampaikan informasi dan mendampingi masyarakat yang belum memiliki akses atau literasi digital yang memadai. Peran komunikatif RT ini terbukti efektif dalam menjembatani kesenjangan digital, memperkecil potensi miskomunikasi, dan memperkuat kohesi sosial di lingkungan sekitar.

Dengan demikian, struktur sosial yang telah lama mengakar di tingkat RT dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai medium untuk memastikan bahwa manfaat dari sistem informasi ini benar-benar menjangkau semua lapisan masyarakat. Bahkan mereka yang selama ini berada dalam posisi rentan atau berisiko terpinggirkan karena keterbatasan teknologi, kini memiliki peluang yang lebih setara untuk menerima bantuan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendekatan teknologi yang berpadu dengan pendekatan sosial dapat menjadi solusi yang berkelanjutan dan inklusif dalam tata kelola pelayanan publik di era digital (Ridwan & Nasution, 2019; Zulkarnaen & Sari, 2021).

Validasi otomatis yang dikembangkan dalam sistem informasi ini menggunakan parameter objektif, yaitu kondisi fisik rumah berdasarkan timestamp, konsumsi listrik dalam satuan kWh, tingkat pendidikan terakhir, serta kelengkapan dokumen administrasi kependudukan (KTP dan KK), telah terbukti secara signifikan mengurangi bias subjektif dalam penentuan penerima bantuan sosial (Irwan & Delfiyan, 2020; Samsul, 2019; Santoso & Aisyah, 2020). Temuan ini menegaskan bahwa penggunaan parameter terukur dan transparan mampu memperbaiki kelemahan utama dari metode manual sebelumnya, yakni subjektivitas yang sering menyebabkan ketidaktepatan sasaran dalam distribusi bansos.

Penelitian ini juga mengungkapkan pentingnya peran RT sebagai mediator antara teknologi informasi dan masyarakat. Meskipun penggunaan teknologi digital semakin meluas, masih ditemukan adanya hambatan dalam akses digital bagi sebagian warga, khususnya kalangan lanjut usia dan mereka yang kurang memiliki literasi teknologi (Patton, 2015; Sugiyono, 2020). Dalam konteks tersebut, mekanisme penyampaian informasi oleh RT terbukti

efektif sebagai pelengkap teknologi digital yang memastikan seluruh lapisan masyarakat tetap terjangkau oleh informasi bansos.

Fitur analitik yang terdapat pada sistem informasi ini juga menjadi keunggulan utama yang memberikan dampak positif bagi proses evaluasi dan pengambilan keputusan distribusi bansos di masa depan. Melalui laporan berkala yang dihasilkan secara otomatis, pihak pengelola bansos dapat dengan mudah mengidentifikasi individu atau kelompok masyarakat yang paling sering menerima bantuan, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan yang lebih adil dan tepat sasaran (Irwan & Delfiyan, 2020; Santoso & Aisyah, 2020).

Namun, implementasi sistem informasi berbasis *website* ini juga menghadapi beberapa tantangan teknis dan sosial. Kendala utama berupa kestabilan jaringan internet yang tidak merata menjadi hambatan signifikan, khususnya di daerah-daerah yang memiliki infrastruktur teknologi informasi yang masih terbatas (Sugiyono, 2020). Selain itu, kurangnya pemahaman awal dan resistensi masyarakat terhadap perubahan digital memerlukan pendekatan sosialisasi yang intensif serta pendampingan yang berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan penerapan sistem (Patton, 2015).

Sebagai langkah strategis ke depan, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah lokal, komunitas masyarakat, serta pengembang teknologi informasi. Pemerintah lokal memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas infrastruktur digital serta melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan rutin bagi pengurus RT maupun warga (Isbandi Rukminto, 2021; Moleong, 2019). Di sisi lain, komunitas masyarakat, termasuk perangkat RT, perlu terus didorong untuk memahami manfaat dan kegunaan sistem digital agar penerapannya bisa lebih optimal.

Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana integrasi teknologi digital dapat meningkatkan pengelolaan bantuan sosial yang selama ini terkendala oleh isu-isu klasik seperti ketidakadilan distribusi dan rendahnya transparansi. Dalam perspektif yang lebih luas, hasil penelitian ini menawarkan panduan dan referensi yang berharga bagi kebijakan publik di berbagai wilayah yang memiliki karakteristik serupa, yaitu tantangan infrastruktur dan literasi digital yang belum merata (Denzin K. & Lincoln S., 2017; Yin, 2018).

Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi awal yang signifikan dalam kajian mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi sosial, sekaligus membuka peluang luas bagi penelitian lanjutan di masa mendatang. Terdapat berbagai dimensi tambahan yang layak untuk dieksplorasi lebih dalam, khususnya terkait dengan dinamika jangka panjang dari implementasi sistem informasi berbasis *website* dalam pengelolaan bantuan sosial. Salah satu arah yang relevan untuk dikaji adalah bagaimana keberadaan sistem ini dapat memengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu yang berkelanjutan, baik dari sisi efisiensi pelayanan publik maupun dampaknya terhadap partisipasi sosial warga (Miles et al., 2018; Ward Creswell & Poth, 2018).

Selain itu, penting juga untuk meneliti sejauh mana efektivitas strategi sosialisasi dan edukasi teknologi informasi yang dilakukan terhadap masyarakat dengan tingkat pendidikan dan literasi digital yang relatif rendah. Pemahaman terhadap faktor-faktor sosial dan budaya yang memengaruhi penerimaan teknologi akan sangat membantu dalam merancang pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif. Tidak kalah penting, penelitian lanjutan juga dapat diarahkan pada aspek integrasi sistem ini dengan teknologi digital mutakhir lainnya, seperti big data analytics, kecerdasan buatan (AI), atau blockchain, guna menciptakan sistem administrasi sosial yang lebih cerdas, responsif, dan tahan terhadap risiko manipulasi data atau penyimpangan prosedural.

Dengan kata lain, temuan dan refleksi dari penelitian ini tidak hanya memperkuat wacana akademik tentang digitalisasi tata kelola sosial, tetapi juga menyarankan agenda riset interdisipliner yang lebih luas untuk menjawab tantangan nyata di era transformasi digital.

Dengan demikian, hasil penelitian ini secara jelas menegaskan bahwa penerapan sistem informasi berbasis website yang dirancang melalui pendekatan struktural serta dilengkapi dengan parameter validasi otomatis bukan hanya sekadar solusi praktis untuk menjawab tantangan teknis dalam proses pendataan dan distribusi bantuan sosial (bansos), melainkan juga merepresentasikan suatu inovasi strategis dalam tata kelola pelayanan publik. Sistem ini menunjukkan kemampuan untuk mengintegrasikan struktur sosial yang ada—khususnya peran aktif lembaga komunitas seperti Rukun Tetangga (RT)—dengan kemajuan teknologi informasi, sehingga menghasilkan mekanisme kerja yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Lebih jauh lagi, sistem ini memiliki potensi besar untuk direplikasi dan diadaptasi secara luas oleh berbagai lembaga pemerintah maupun non-pemerintah yang bergerak dalam bidang pelayanan sosial. Sebagai model implementasi kebijakan publik berbasis teknologi, sistem ini dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan program-program serupa yang memerlukan ketepatan data dan distribusi, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya namun membutuhkan sistem pengelolaan yang tertib dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi tidak hanya dalam konteks akademik dan praktik lokal, tetapi juga dalam memperkaya diskursus tentang bagaimana teknologi informasi dapat digunakan secara efektif untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan kebijakan publik secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Denzin K., N., & Lincoln S., Y. (2017). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). SAGE Publication.
- Irwan, E., & Delfiyan, W. (2020). Implementasi Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Bantuan Sosial. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 24(2), 109–120.
- Isbandi Rukminto, A. (2021). Kebijakan Bantuan Sosial dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Jakarta. *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*.
- Miles, M., Huberman, M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)* (34th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Nurmandi, A., & Fahlevi, M. (2020). Digitalisasi Pelayanan Publik: Studi Kasus Bantuan Sosial. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 3(1), 45–57.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (4th ed.). SAGE Publications.
- Ridwan, M., & Nasution, Z. (2019). Analisis Kesenjangan Digital dalam Program Bantuan Sosial. *Jurnal Komunikasi Sosial Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 127–141.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). *Management Information Systems for the Information Age* (10th ed.). Pearson Education.
- Samsul, H. (2019). Evaluasi Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Berbasis Sistem Informasi. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 143–154.
- Santoso, B. A., & Aisyah, S. (2020). Sistem Informasi Distribusi Bantuan Sosial Berbasis Web untuk Meningkatkan Transparansi. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 11(1), 1–8.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Ward Creswell, J., & Poth, C. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.

Zulkarnaen, R., & Sari, R. P. (2021). Dampak Sistem Informasi terhadap Efisiensi Distribusi Bantuan Sosial di Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 12(3), 279–292.